

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perekonomian di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. UMKM juga sudah terbukti dapat bertahan dengan keadaan ketidakstabilan perekonomian di Indonesia. UMKM merupakan usaha kreatif yang memiliki berbagai macam bidang usaha. UMKM menjadi pilihan yang paling diminati setelah terjadinya krisis ekonomi yang berdampak pada PHK di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia pada saat itu. Pertumbuhan UMKM di Indonesia dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1
Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2014-2017

Indikator	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Unit Usaha (A-B)	57.900.787	59.267.759	61.656.547	62.928.077
A. UMKM	57.895.721	59.262.772	61.651.177	62.922.617
-Usaha Mikro (UM)	57.189.393	58.521.987	60.863.578	62.106.900
-Usaha Kecil (UK)	654.222	681.522	731.047	757.090
-Usaha Menengah (UM)	52.106	59.263	56.551	58.627
B. Usaha Besar (UB)	5.006	4.987	5.370	5.460

Sumber: Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia <http://www.depkop.go.id/data-umkm/>

Kementrian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia menyebutkan bahwa kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap produk domestik bruto mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan 2017 dari 57,84% menjadi 60,00%. Hal ini membuktikan bahwa UKM sangat

berperan dalam roda perekonomian dan menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit. Meningkatnya perekonomian di Indonesia juga tidak terlepas dari banyaknya UKM dan UMKM yang bermunculan belakangan ini, UKM dan UMKM juga memberikan kontribusi terhadap PDB (Saputro, dkk, 2010). Semakin berkembangnya bisnis yang ada, meningkat pula persaingan antar pelaku bisnis. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan UKM yang ada di Indonesia yang terus mengalami peningkatan

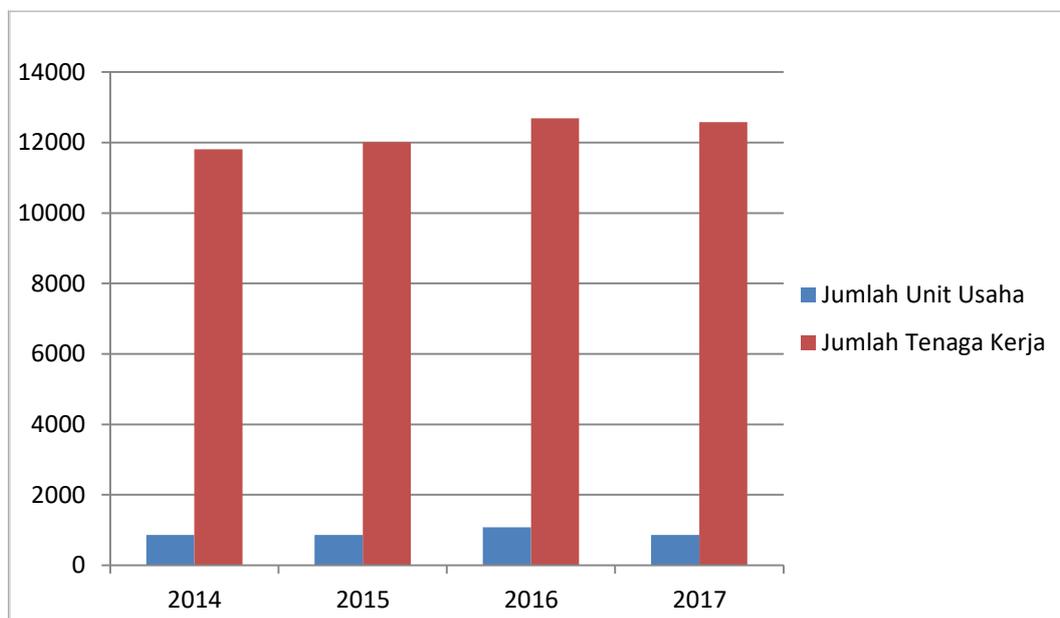
Pemerintah juga menyadari peran penting UKM bagi roda perekonomian, dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pengembangan ekonomi local sesuai potensi daerahnya sangatlah penting. Salah satunya di kota Pekalongan yang terkenal dengan beraneka ragam kerajinan batiknya.

Kota Pekalongan, Jawa Tengah, biasa kita kenal dengan sebutan kota batik atau "*The World's City Of Batik*". Pada tanggal 1 April 2011, Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) menetapkan Pekalongan dengan *tagline* "*The World's City Of Batik*". Dengan adanya *tagline* "*The World's City Of Batik*" warga Pekalongan berusaha untuk tetap menunjukkan ciri khas dari kotanya dan berlomba-lomba melakukan kreasi dengan batik.

Batik termasuk kedalam karya seni bergambar yang secara khusus menggunakan malam lalu diolah dengan cara khusus yang memiliki kekhasan dan biasanya dituangkan dalam media berupa kain atau sebagainya.

Kerajinan batik telah diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga terciptalah UMKM Batik di Kota Pekalongan yang sejak lama sudah menjadi sumber mata pencaharian dan nafkah bagi puluhan ribu masyarakat di Kota Pekalongan. Menurut Badan Pusat Statistika Pekalongan pada tahun 2016 jumlah penduduk di Pekalongan mencapai 299.222 jiwa, terdiri dari 149.623 jiwa laki-laki (50%), dan 149.599 jiwa perempuan (50%).

Batik Pekalongan merupakan batik yang sangat terkenal, hasil dari produksi batik Pekalongan tidak hanya di pasarkan ke berbagai pasar dalam negeri seperti Jogja, Bogor, Jakarta, Medan, Makassar, Aceh, dan daerah lainnya. Hasil Produksi Batik Pekalongan juga di pasarkan ke berbagai negara seperti Amerika, Australia, Jepang, Korea, Timur Tengah dan negara lainnya. Ciri khas dari batik Pekalongan yang menjadikan batik Pekalongan sangat di kenal di seluruh Indonesia dan mencapai kancah Internasional. Pertumbuhan UMKM Batik di Kota Pekalongan dapat dilihat dari grafik dibawah ini:



Sumber : Data Primer, Disperindagkop dan UMKM Kota Pekalongan, 2018

Grafik 1 1

Jumlah Unit Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja Pada Sektor Batik di Kota Pekalongan Tahun 2014-2017

Dari grafik diatas dapat kita simpulkan bahwa usaha batik terus berkembang dilihat dari tahun 2014 unit usaha berjumlah 860 dengan menyerap tenaga kerja sebesar 11.811 jiwa, tahun 2015 unit usaha batik berkembang menjadi 861 dengan tenaga kerja yang terserap sebanyak 12.004 jiwa, dan tahun 2016 unit usaha batik meningkat cukup tinggi sebesar 1.077 dan jumlah tenaga kerja yang terserap sebesar 12.690 jiwa. Dan data terbaru pada tahun 2017 terdapat unit usaha batik sebesar 861 hal ini mengalami penurunan yang diikuti penurunan penyerapan tenaga kerja yang juga menurun menjadi 12580.

Penurunan usaha batik ini karena beberapa usaha batik yang mengalami gulung tikar, penurunan UMKM Batik di sebabkan oleh kenaikan biaya-biaya

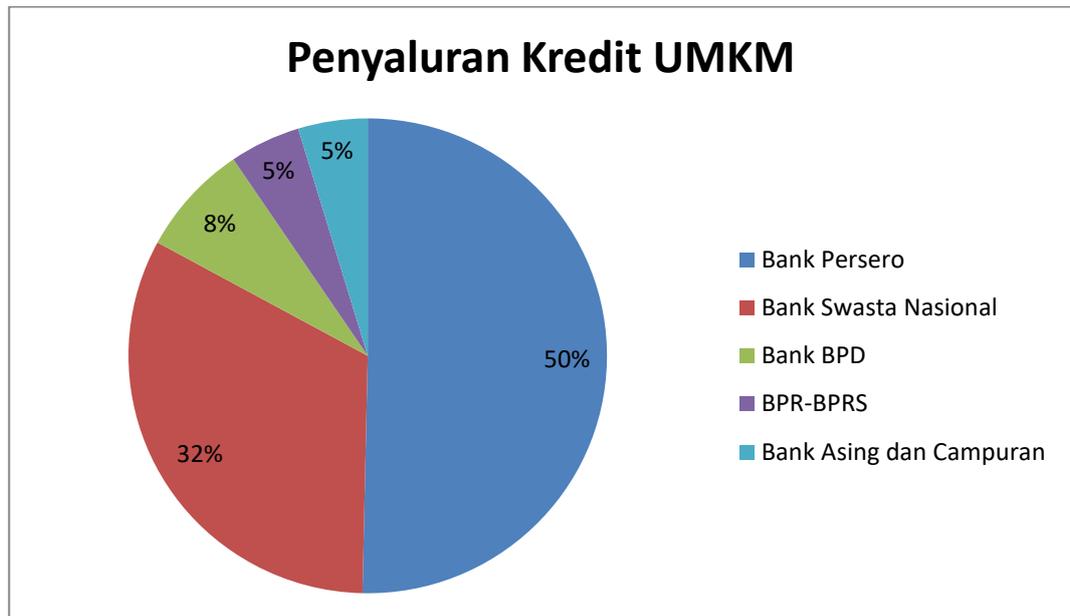
produksi tetapi tidak diikuti minat dan daya beli masyarakat sehingga beberapa pengusaha batik tidak sanggup lagi melakukan produksi batik, penyebab lain dari penurunan UMKM Batik di Kota Pekalongan disebabkan oleh persaingan yang ketat antar penggiat UMKM Batik tidak hanya yang berada di Pekalongan tetapi juga yang berada di luar Pekalongan seperti produksi Batik Cina. Wardana (2008) melakukan penelitian mengenai “Daya Saing Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Inti Terhadap Batik Cina Di Kota Pekalongan” dalam penelitiannya Wardana mengidentifikasi daya saing Batik Pekalongan terhadap Batik Cina.

Penurunan jumlah UMKM Batik di Kota Pekalongan artinya meningkatkan jumlah pengangguran yang ada di Kota Pekalongan. Dengan demikian artinya penurunan UMKM Batik merupakan suatu masalah yang cukup perlu perhatian dari pemerintah Pekalongan. Penurunan UMKM batik juga berarti bahwa perkembangan UMKM batik di Kota Pekalongan tidak semudah yang dilihat, para pemilik UMKM Batik harus bisa bertahan dibawah persaingan yang ketat antar penggiat UMKM Batik dan bertahan dengan keadaan ketidakstabilan ekonomi yang menyebabkan kenaikan harga dan kelangkaan bahan-bahan serta alat yang digunakan untuk memproduksi batik.

Pemilik UMKM Batik harus melakukan inovasi dan kreatifitas secara terus menerus untuk dapat bersaing dan bertahan dalam persaingan yang ketat antar pelaku UMKM Batik, dengan inovasi dan kreatifitas terhadap produk kerajinan batik maka akan meningkatkan kembali daya beli masyarakat.

Pemilik UMKM Batik akan berinovasi dan melakukan kreasi terhadap kerajinan batik agar menarik minat konsumen dan dapat bertahan di pasar persaingan akan tetapi mereka dihadapkan masalah lain yakni masalah terbatasnya modal yang mereka miliki. Karena mahal nya faktor produksi batik seperti pewarna tekstil, harga kain yang semakin hari semakin naik dan kelangkaan kain, malam, dan masih banyak lagi.

Suci (2017) menjelaskan salah satu sektor yang terpengaruh dari pertumbuhan UMKM adalah jasa perbankan yang ikut terpengaruh, sebab hampir 30% usaha UMKM menggunakan modal operasional perbankan. Artinya pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro yang ada termasuk UKM batik tidak terlepas dari dukungan perbankan dengan penyaluran kredit yang diberikan kepada UKM. Setiap tahunnya pertumbuhan pemberian kredit terhadap UKM mengalami peningkatan. Kredit UMKM adalah kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit yang diberikan kepada UMKM/UKM yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya kredit yang diberikan dengan mudah meskipun dirasa belum memenuhi standar yang bank berikan. Hal ini merupakan satu dari beberapa bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan diawasi oleh OJK (otoritas jasa keuangan) untuk meningkatkan usaha bagi para pelaku UKM yang ada dan dengan harapan adanya bantuan ini akan bermunculan para pelaku UKM lainnya.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1 2
Penyaluran Kredit UMKM Tahun 2017

Pemberian kredit kepada UKM semakin tahunnya semakin meningkat. Dari Grafik 1.2 di atas yang merupakan data tahun 2017. Menurut kelompok bank, Kredit UMKM sebagian besar disalurkan oleh kelompok bank persero sebesar 50%, Bank Swasta Nasional 32%, Bank BPD 8%, BPR-BPRS 5%, Bank Asing dan Campuran 5%.

Pemilik UKM batik di Pekalongan yang kekurangan modal bisa mengajukan KUR untuk menambah modal usahanya. Para pemilik UKM batik bisa mengajukan ke bank yang mereka anggap mampu memberikan pinjaman kepada mereka. Mereka bisa memilih ke bank konvensional atau bank syariah dalam melakukan pembiayaannya. Yang menjadi pertanyaan di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama muslim masih banyak

yang melakukan pembiayaan di bank konvensional yang jelas masih menggunakan bunga, adanya unsur ketidakjelasan dll, sedangkan sudah banyak bank syariah di Indonesia. Termasuk para pemilik UKM batik di Pekalongan yang mayoritas muslim masih banyak melakukan pembiayaan di bank konvensional.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang sejarah perbankan syariah yang ada di Indonesia, inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi yang bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Pada tahun 1990 dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia, hasil kerja dari tim ini yaitu berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI). Awal mula berdirinya bank syariah belum ada landasan kuat, sampai akhirnya dibuat undang-undang mengenai perbankan syariah untuk landasan berjalannya bank syariah di Indonesia. Dari cikal bakal syariah hingga akhirnya sekarang banyak bermunculan bank-bank syariah di Indonesia, meski tetap saja bank syariah berusaha memperbaiki sistem kerjanya agar dapat bersaing dengan bank konvensional yang sudah lebih dahulu melayani para nasabah di Indonesia. Di Pekalongan dan sekitarnya perkembangan bank syariah baru 6% dari target nasional yang ditentunkan 11%, hal ini disampaikan oleh Hantoro dari BI Perwakilan Tegal pada acara seminar nasional 25 September 2018. Dalam pemberian kredit bank syariah dan konvensional memiliki beberapa perbedaan yang mendasar, berikut beberapa perbedaan yang dapat dilihat di tabel 2.

Tabel 1. 2
Perbedaan KPR Bank Konvensional dan Bank Syariah

	Bank Konvensional	Bank Syariah
Fungsi bank	Fungsi menghimpun dana, menyalurkan dana, dan jasa-jasa keuangan.	Fungsi menghimpun dana, menyalurkan dana jasa-jasa keuangan, dan fungsi sosial (penyaluran ZIS, wakaf, dll)
Regulasi (ketentuan yang mengatur)	a. Peraturan Bank Indonesia b. Peraturan Otoritas jasa keuangan (POJK)	a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) c. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
Struktur Organisasi Perbankan	a. Komisaris b. Direktur	a. Dewan Pengawas Syariah b. Komisaris c. Direksi
Sumber Pendapatan	Bunga Bank	Margin/keuntungan dari transaksi jual beli, bagi hasil dari transaksi bagi hasil, ujhroh dari transaksi ijarah
Prinsip Transaksi	Menguntungkan, Prudential Banking	Sesuai Prinsip Syariah

Sumber: Bank Muamalat Indonesia www.bankmuamalat.co.id

Selain perbedaan KPR antara Bank Syariah dan Bank Konvensional yang terdapat di tabel, perbedaan lainnya adalah cara perhitungan kewajiban. Di bank syariah tidak mengenal istilah bunga murah atau rendah. Dalam prinsip ini maksudnya pembayaran cicilan kredit yang dibayarkan perbulannya tetap atau sama dari awal hingga akhir sepanjang masa kredit. Sedangkan KPR bank konvensional menawarkan hal yang berbeda dengan pemberian bunga murah atau rendah di masa awal kredit antara 1 sampai 3 tahun awal, selanjutnya bunga menyesuaikan kondisi pasar sehingga cicilan yang dibayarkan berbeda-beda.

Masyarakat menganggap bahwa kredit di bank syariah lebih mahal karena pembayaran cicilan yang tetap selama masa kredit, jika dihitung kembali pembiayaan di bank konvensional lebih mahal dan bank syariah sangat melindungi hak nasabah yang melakukan pembiayaan karena tidak tergantung dengan acuan bunga pasar yang terkadang naik dan turun (Ramdika dalam Kompasiana, 2016). Hal yang membedakan antara KPR di bank konvensional dan syariah lainnya, ketika terjadi keterlambatan pembayaran kredit di bank konvensional maka bank berhak menjatuhkan denda/sanksi bagi nasabah yang lalai membayar sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan. Besarnya sanksi antar nasabah berbeda karena ditentukan dari berapa % (persen) jumlah angsurannya dan ada sanksi perhari setiap keterlambatan. Di bank konvensional sama halnya jika terdapat nasabah yang lalai membayar kredit akan dijatuhkan sanksi tetapi sanksi yang diberikan jumlahnya sudah ditentukan oleh LKS misalnya besarnya angsuran X (nominal fix yang ditentukan) dan keterlambatan tidak dihitung perhari. Hasil dari denda/sanksi yang didapat oleh bank konvensional dianggap sebagai pendapatan sedangkan di bank syariah dana ini masuk kedalam dana sosial (*dana ta'zir*) (Mahdi dalam Kompasiana, 2011).

Faktor-faktor lain yang menyebabkan masyarakat memilih bank konvensional dalam melakukan pembiayaan karena masyarakat sudah terbiasa di bank konvensional yang memang sudah lebih dulu berdiri dan eksis dalam melayani pembiayaan jauh sebelum bank syariah muncul. Kurangnya wawasan/pengetahuan masyarakat mengenai bank syariah juga

berpengaruh dalam pemilihan pembiayaan, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami betul bagaimana sistem kerja di bank syariah, apa saja produk yang ditawarkan oleh bank syariah dalam sistem pembiayaannya. Maka perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bank syariah agar masyarakat bisa lebih memahami dan mau beralih dari bank konvensional ke bank syariah. Masih banyak lagi faktor yang menyebabkan masyarakat terlebih dalam kasus ini para pemilik UKM batik di Pekalongan untuk memilih pembiayaan di bank syariah atau bank konvensional.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, pemilik UMKM Batik dalam memilih pembiayaan dipengaruhi beberapa faktor yang pertama religiusitas karena mayoritas pemilik UMKM Batik beragama islam, yang kedua wawasan atau pengetahuan mengenai bank syariah, yang ketiga produk yang ditawarkan oleh bank, dan yang terakhir fasilitas serta pelayanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang ditujukan kepada masyarakat Pekalongan atau lebih khususnya para pemilik UKM batik di Pekalongan yang memutuskan melakukan pembiayaan di bank syariah dengan mempertimbangkan segala faktor-faktor yang ada, dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilik UKM Batik di Kota Pekalongan Dalam Memilih Pembiayaan di Bank Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang menjadi dasar kajian penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut :

1. Apakah faktor religiusitas/agama mempengaruhi keputusan para pemilik UKM batik di kota Pekalongan dalam memilih pembiayaan di bank syariah?
2. Apakah faktor wawasan/pengetahuan mempengaruhi keputusan para pemilik UKM batik di kota Pekalongan dalam memilih pembiayaan di bank syariah?
3. Apakah faktor produk mempengaruhi keputusan para pemilik UKM batik di kota Pekalongan dalam memilih pembiayaan di bank syariah?
4. Apakah faktor fasilitas dan pelayanan yang diberikan bank syariah mempengaruhi keputusan para pemilik UKM batik di kota Pekalongan dalam memilih pembiayaan di bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah faktor religiusitas/agama mempengaruhi para pemilik UKM batik di kota Pekalongan dalam memilih pembiayaan di bank syariah.
2. Untuk mengetahui apakah faktor wawasan/pengetahuan mempengaruhi para pemilik UKM batik di kota Pekalongan dalam memilih pembiayaan di bank syariah.

3. Untuk mengetahui apakah faktor produk yang ditawarkan bank syariah mempengaruhi para pemilik UKM batik di kota Pekalongan dalam memilih pembiayaan di bank syariah.
4. Untuk mengetahui apakah faktor fasilitas dan pelayanan yang diberikan bank syariah mempengaruhi para pemilik UKM batik di kota Pekalongan dalam memilih pembiayaan di bank syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi perbankan khususnya bank syariah dalam menghadapi dan melayani konsumen.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi perbankan dalam menetapkan instrumen kebijakan dan strategi pemasaran.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi masyarakat maupun pihak perbankan dalam memahami sikap masyarakat terhadap perbankan syariah.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang sama di masa yang akan datang.